

Masyarakat Diminta Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Banten

SERANG (IM)- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan gelombang tinggi 2,5 meter di perairan Banten yang meliputi selatan Banten, Samudera Hindia dan Selat Sunda bagian selatan. Untuk itu, nelayan dan masyarakat sekitar diminta mewaspada potensi ancaman tersebut.

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kelas I Serang, Tatang Rusmana, mengatakan bahwa beberapa hari ke depan pelaku pelayaran khususnya nelayan yang menggunakan perahu kecil dan kapal tongkang agar meningkatkan kewaspadaan cuaca buruk yang melanda perairan Banten meliputi selatan Banten, Samudera Hindia dan Selat Sunda bagian selatan. Peringatan kewaspadaan itu agar tidak menimbulkan kecelakaan laut, di mana tinggi gelombang di perairan itu berkisar antara 1,25 hingga 2,50 meter (sedang).

Oleh karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan terhadap

nelayan dan nakhoda kapal tongkang jika melintasi perairan itu yang berada di pesisir Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan, penyeberangan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung relatif normal dan aman melintasi Perairan Selat Sunda bagian utara dengan tinggi gelombang 1,25 meter (rendah).

Sementara itu, tiupan angin bergerak dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 05-30 kilometer per jam. Suhu udara 23-34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 60-95 persen.

Pada pagi, siang, malam hari cuaca di Banten dan sekitarnya cerah berawan dan hujan intensitas ringan terjadi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). ● **pra**

Kalah Suara di Pemilu 2024, Caleg Asal Lebak Bongkar Pos Ronda

LEBAK (IM)- Dalam video viral yang beredar di masyarakat, diduga sekelompok masyarakat yang merupakan simpatisan Caleg DPRD Lebak Dapil 5 dari Partai Nasdem membongkar pos ronda bantuan dari dirinya yang berada di Kampung Babakan Jaha, Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Video tersebut viral pada 21 Februari 2024 lalu, dan menunjukkan pos ronda sudah rata dengan tanah dan hanya tersisa material kayu dan bambu. Terkait kejadian tersebut, Kepala Desa Rahong Bedi membenarkan, adanya pos ronda yang dibongkar oleh masyarakat. Diduga pembongkaran karena salah satu caleg DPRD Lebak gagal meraih suara di Kampung Babakan.

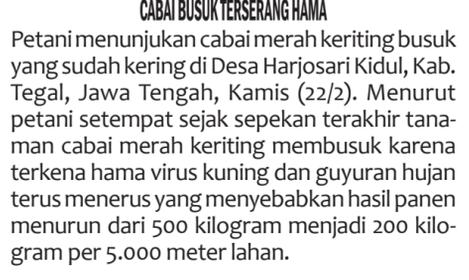
"Itu mah suruh dibongkar ke masyarakat karena numpang di tanah salah satu calon," kata Bedi kepada wartawan, Kamis (22/2).

Disebutkan Bedi, Pos Ronda itu telah lama berdiri. Namun usai Pemilu 2024 karena caleg kalah suara, akhirnya pos ronda tersebut dibongkar. Sehingga saat ini pos ronda sudah rata dengan tanah. "Iya itu (Caleg) mantan Jaro atau kepala desa. Menurut saya wajar saja sih karena warga juga setiap calon diterima," ucapnya.

Sementara warga Malingping Agus Rusmana menyampaikan, seharusnya semua caleg yang berkompetisi harus siap dan bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. "Caleg itu siap menang dan siap kalah, bukannya malah membuat kisruh dengan membongkar apa yang telah diberikan kepada warga," ucap Agus.

Ditambahkannya, warga pun memaklumi apa yang telah dilakukan timses Caleg yang membongkar pos ronda tersebut.

"Warga di sini biasa-biasa aja tuh melihat pembongkaran pos ronda, karena warga juga memaklumi dengan tindakan dari timsesnya tersebut," pungkasnya. ● **pra**



CABAI BUSUK TERSERANG HAMA

Petani menunjukkan cabai merah keriting busuk yang sudah kering di Desa Harjosari Kidul, Kab. Tegal, Jawa Tengah, Kamis (22/2). Menurut petani setempat sejak sepekan terakhir tanaman cabai merah keriting membusuk karena terkena hama virus kuning dan guyruran hujan terus menerus yang menyebabkan hasil panen menurun dari 500 kilogram menjadi 200 kilogram per 5.000 meter lahan.

Pemkab Banyumas Prioritaskan Bangun Jalan dan Jembatan Pada 2024-2025

PURWOKERTO (IM)- Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi pada 2024-2025 karena banyak mengalami kerusakan, sehingga dikeluhkan oleh masyarakat.

"Saya 'dihajar' betul, tiap hari di-WA (WhatsApp) oleh masyarakat. Setelah saya cek ke lapangan, ternyata benar, dedel duel (rusak parah) infrastrukturnya," kata Penjabat (Pj) Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Kamis (22/2).

Ia mengatakan pada dedel duel (rusak parah) infrastrukturnya, kata Penjabat (Pj) Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Kamis (22/2).

Ia mengatakan kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada infrastruktur jalan dan jembatan, juga dialami oleh saluran irigasi.

Menurut dia, pihaknya pun menanyakan hal itu kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas dan mendapatkan informasi jika ada beberapa infrastruktur yang tidak menjalani perawatan selama 15 tahun. "Memang yang paling parah saat pandemi COVID-19 kemarin, anggaran pemeliharaan selama tiga tahun itu tidak ada," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan benar-benar fokus terhadap penanganan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya



IDN/ANTARA

DAMPAK PUTING BELIUNG DI KABUPATEN SUMEDANG

Foto udara kawasan industri yang terdampak angin puting beliung di Kab. Sumedang, Jawa Barat, Kamis (22/2). BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat, bencana angin puting beliung yang terjadi di Kab. Sumedang dan Kab. Bandung tersebut mengakibatkan 97 rumah dan 17 unit bangunan pabrik mengalami kerusakan serta 413 kepala keluarga terdampak dan 31 orang dilarikan ke rumah sakit.

Pemkot Tangerang Sebar 208 Ton Beras, Ukuran 5Kg Seharga Rp52 Ribu

Setiap kelurahan akan disediakan dua ton beras medium Stabilisasi Pasokan Harga Pangan. Harga beras yang dijual pun dengan harga murah di bawah harga pasar saat ini. Hal ini merupakan upaya Pemkot Tangerang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam menyediakan pangan murah.

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) bekerja sama dengan Bulog, menjual beras medium Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) Gerakan Pangan Murah (GPM). Beras ini disebarkan ke 104 kelurahan sebagai upaya stabilisasi harga.

Kepala DKP Kota Tangerang, Muhdorun menuturkan, setiap kelurahan akan disediakan dua ton beras SPHP. Harga beras yang dijual pun dengan harga murah di bawah harga pasar saat ini.

Hal ini merupakan upaya dari Pemkot Tangerang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya

dalam menyediakan pangan murah.

"Beras yang dijual adalah ukuran 5kg dengan harga Rp52 ribu. Berarti, dengan harga per kilogram adalah Rp10.400," ungkapnya, Kamis (22/2).

GPM akan berlangsung selama tiga hari mulai dari hari ini hingga 24 Februari 2024. Lalu, akan dilanjutkan disesuaikan dengan harga beras di pasaran.

Diharapkan, masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik.

"Kami harap dengan GPM ini kebutuhan pangan masyarakat bisa tercukupi. Mudah-mudahan, program GPM ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal," lanjutnya.

Di Kecamatan Cibodas, gerakan pangan murah ber-

langsung bersama dengan event Pekan Raya Kota Tangerang yang menghadirkan produk UMKM unggulan, kesenian, kuliner, hingga hiburan.

Camat Cibodas, Buceu Gartina, mengatakan Pekan Raya Kota Tangerang dibuka sejak pukul 08.00 WIB, hingga selesai. Event ini dibuka untuk umum secara gratis tanpa tiket masuk.

Di Pekan Raya Kota Tangerang terdapat 3 stand UMKM unggulan Kota Tangerang, 1 stand Job Fair, 1 stan Dinas Kesehatan, 1 Stand perbankan, dan 1 stand perpajakan.

"Sepanjang empat hari berlangsung, Pekan Raya Kota Tangerang akan dimekarkan dan dipadati dengan berbagai kegiatan. Ditambah

ada dengan gerakan pangan murah buat masyarakat Kota Tangerang dan siapapun yang hadir," ujarnya.

Salah satu warga, Lianah, mengaku sangat terbantu dengan program ini. Ia dapat membeli beras dengan harga Rp52 ribu per 5 kilogram, jauh lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp70 ribu.

"Selisihnya bisa dipakai untuk membeli kebutuhan lain," kata Lianah, warga Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas.

Hal senada diungkapkan Gunawan. Ia berharap program ini dapat diperluas jangkauannya dan diutamakan pelaksanaannya.

"Sangat bermanfaat, di sini sudah disediakan job fair dan berbagai hiburan," tuturnya. ● **pp**

PUPR Banten Bangun 2 Ruas Jalan Akses Menuju Tempat Wisata

SERANG (IM)- Pembangunan ruas jalan Sumur-Taman Jaya di Kabupaten Pandeglang dan Ciparay-Cikumpay di Kabupaten Lebak akan rampung tahun ini.

Pembangunannya diperkirakan selesai dalam waktu 10 bulan. Hal itu diketahui saat PUPR Banten melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga.

Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan mengatakan, pembangunan ruas jalan tersebut sebagai penghubung menuju akses destinasi wisata.

Untuk pembangunan jalan Sumur-Tamanjaya, bukan hanya peningkatan ekonomi pada wisata, tapi juga pada sektor pertanian.

"Kemudian Ciparay-Cikumpay pasti kita isolasi kawasan, kita buka sekarang dan itu juga ke depannya salah satu dukun-

gan terhadap rencana dari Geopark Bayah," katanya, Kamis (22/2).

Ia menjabarkan, dua jalur penunjang akses wisata ini baru dibangun, setelah kewenangannya ditingkatkan dari Pemkab Pandeglang dan Pemkab Lebak menjadi milik Pemprov Banten.

"Dua (jalan) ini, karena memang kondisinya rusak berat, ini kita tingkatkan statusnya," paparnya.

Ia menjelaskan, pembangunan ruas jalan Sumur-Taman Jaya menelan anggaran sebesar Rp87.865.159.000 dengan panjang 12,27 kilometer.

Dalam pembangunannya menggunakan jenis konstruksi Beton FS 4,5 MPa dan 5 Jembatan Void-Ed Slab melalui penyedia PT Ris Putra Delta.

Pembangunan ini akan mempermudah transpor-

tasi di wisata Taman Nasional Ujung Kulon dan sejumlah pantai.

Kemudian untuk pembangunan ruas jalan Ciparay-Cikumpay menghabiskan anggaran Rp87.697.441.000 sepanjang 12,27 kilometer.

Pembangunannya menggunakan jenis konstruksi beton FS 4,5MPa dan penanganan longsor dengan sheet pile melalui penyedia PT Lambok Ulina.

Jalur ini menghubungkan wisata Negeri di Atas Awan Citorek hingga Pantai Sawarna. Sehingga total pembangunan dua ruas jalan tersebut menelan anggaran Rp175.562.600.000.

"Pelaksanaan 10 bulan. Hari ini atau lusa kontraktor dan tim turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lagi untuk pengukuran ulang memastikan kondisi," jelasnya. ● **pra**

Disdukcapil Serang Permudah Layanan Adminduk di Kecamatan

SERANG (IM)- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang, Banten, mempermudah pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dengan pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan di 29 kecamatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kabupaten Serang, Tubagus Maftuhi, di Serang, Banten, Kamis (22/2), mengaku terus melakukan inovasi dalam pelayanan adminduk dengan menjalin kerja sama dengan pihak kecamatan sebagai upaya untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan berbagai pelayanan.

"Kita sudah mengund-ang 29 kecamatan yang ada untuk dilakukan kerja sama terkait pelayanan adminduk. Sebelumnya kepada 14 organisasi perangkat daerah (OPD) juga sudah diberikan hak akses pelayanan," ujarnya.

Maftuhi mengatakan setelah membangun kerja sama, selanjutnya akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai turun pengesahan persetujuan.

"Jika sudah ada persetujuan dari kementerian berarti kita sudah valid untuk memberikan user id untuk hak akses," katanya.

Selain itu, kata Maftuhi, kerja sama ini dilakukan untuk mempermudah OPD melakukan verifikasi dan validasi dalam pelaksanaan pelayanan, dan memastikan bahwa data masyarakat telah sesuai dengan database kependudukan, salah satunya dengan pemerintah kecamatan.

Sebelumnya Disdukcapil juga sudah melakukan kerja sama dengan perbankan, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik-klinik dan

para bidang yang membuka praktik.

"Dengan semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat sudah kita bangun kerja sama, mudah-mudahan berjalan dengan baik untuk pemenuhan adminduk masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) Disdukcapil Kabupaten Serang, Hani Finola mengatakan hak akses pemanfaatan data kependudukan dapat diperoleh setelah adanya perjanjian kerja sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan.

PKS dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan, tahapan, dan tata cara pemberian hak akses sesuai Permenagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenagri Nomor 102 Tahun 2019.

"Ditjen Dukcapil tidak membenarkan data kependudukan, yang diberikan adalah hak akses melalui PKS pemanfaatan data kependudukan dengan tujuan untuk mencocokkan data penduduk yang dimiliki pengguna dengan data kependudukan yang tersimpan dalam database kependudukan Kemendagri dengan berbasis NIK," katanya.

Hani menambahkan, pemanfaatan data kependudukan daerah bentuk dukungan nyata Disdukcapil dalam rangka meningkatkan akurasi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik di daerah, juga sebagai kontribusi dalam mendukung ekonomi secara nasional.

"Semoga baik OPD maupun kecamatan dapat segera berkoordinasi di jajarannya untuk persiapan perpanjangan PKS, dan pengajuan baru permohonan hak aksesnya," tuturnya. ● **pra**



IDN/ANTARA

TBAZAR BERAS MURAH DI TANGERANG

Warga antre membeli beras murah pada acara Bazar Beras Murah di Kelurahan Nerogtog, Kota Tangerang, Banten, Kamis (22/2). Pemerintah Kota Tangerang bekerja sama dengan Perum Bulog mengadakan acara tersebut guna menstabilkan harga beras di pasaran.